

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR



RENCANA KERJA POKOK (RENJA – POKOK)

TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan setiap daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah kedalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur sebagai salah satu Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memiliki kewajiban setiap tahunnya untuk menyusun Renja tersebut.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur, yang disusun guna menjamin konsistensi, keterkaitan, keselarasan antara perencanaan dan penganggaran perangkat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 merupakan rencana pembangunan perangkat daerah yang berjangka satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat berdasarkan rancangan prioritas yang akan dicapai. Renja tersebut selanjutnya akan dituangkan kedalam beberapa program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang tak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan RENJA Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Luwu Timur adalah :

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Dalam Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
3. Peraturan Menteri Dalam Hegeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada pasal 18 ayat (1) yang menerangkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disampaikan oleh Kepala Daerah dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 03 Tahun 2018 tentang Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 03);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020.
8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 58).

1.3 Visi dan Misi Kepala Daerah

1. Visi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 mempunyai visi sebagai berikut :

"LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA".

Visi ini bermakna Kabupaten Luwu Timur yang berkelanjutan bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan kemudian yang buruk di masa lalu hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan, lebih maju mengandung makna bahwa apa yang dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian masa lalu, berlandas nilai agama dan budaya mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai – nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah – langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi untuk mendukung visi tersebut :

1. Meningkatnya Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat secara menyeluruh.
2. Berkembangnya Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Berjangkauan Luas.
3. Tersedianya Infrastruktur Daerah yang Memadai dan Lingkungan yang Berkualitas.
4. Terciptanya Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik.
5. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban bagi Seluruh Warga Masyarakat.
6. Terjaminnya Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada Agama dan Budaya.

Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mengemban tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang berkaitan langsung dengan misi ke – 6 yaitu : **"Terjaminnya Keberlangsungan Pembangunan yang Berbasis pada Agama dan Budaya"** dengan tujuan untuk mewujudkan keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan berlandas nilai-nilai agama dan budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Luwu Timur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA adalah agar setiap instansi pemerintah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat menerangkan perencanaan kerja yang akan dilakukan pada tahun 2022, dan sejalan dengan upaya mewujudkan good governance yang mengacu pada Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor : 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2021 – 2026.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur yaitu :

1. Mewujudkan visi misi Bupati & Wakil Bupati Terpilih 2021 - 2026 Kab. Luwu Timur;
2. Sebagai pedoman dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
4. Dasar untuk melaksanakan pengawasan dan evaluasi program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur.

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, di susun seperti berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu (tahun n-2) & perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja perangkat daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program & kegiatan pelaksanaan renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu, & realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja perangkat daerah, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah pada tahun rencana.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta mengidentifikasi realisasi pencapaian target indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Daerah dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun sesuai dengan besaran indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2021 pandemi covid-19 yang masih mewabah menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan revocusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan percepatan penanganan covid-19 dilingkungan pemerintah daerah. Realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD tahun 2021 digunakan untuk penanganan tanggap darurat pandemic covid-19 dan pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak, begitupun dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik juga mengalami refocusing anggaran dimana ada beberapa sub kegiatan yakni : pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan (pendidikan bela Negara), pendidikan politik dan Pemeliharaan bangunan/gedung kantor.

Review Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan politik sampai triwulan IV tahun 2021 dan Realisasi APBD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Dapat dilihat pada tabel TC-29.

Tabel TC-29

REKAPITULASI EVALUASI HASILPELAKSANAAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/sub kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2026		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD/Renja PD sd Tahun Lalu (0)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang Di Evaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja RKPD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD yang dievaluasi Tahun 2021		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD 2021 s/d 2026				Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2026(%)	
									I		II		III		IV											
2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12(8+9+10+11)		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot a	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100	3,768,536,901	100	1,360,455,072																				
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	69,500,000	100	6,940,000											41,636,105			100	48,576,105	5.50	3.25			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang disusun (Dokumen)	2	3,000,000	9	4,520,000	3	24,916,390	1	-	1	5,186,240	1	6,462,850	-	11,987,300	3	23,636,390	100.00%	94.86%	12	28,156,390	600	939		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	35,000,000	0	-	2	3,608,155	1	-	-	1,518,155	1	1,320,000	-	770,000	2	3,608,155	100.00%	100.00 %	2	3,608,155	100	10		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu (Dokumen)	2	25,000,000	0	-	2	3,578,155	1	-	-	970,000	1	1,538,155	-	1,070,000	2	3,578,155	100.00%	100.00 %	2	3,578,155	100	14		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Laporan)	10	6,500,000	1	2,420,000	10	11,318,405	4	392,620	2	2,293,020	2	695,940	2	7,431,825	10	10,813,405	100.00%	95.54%	11	13,233,405	110	204		
							43,421,105	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.89%							
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!			

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	2,729,536,901	100	827,565,378					473,825,227						1,023,067,311			100	1,850,632,689	100	68	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan (Orang)	18	2,649,536,901	9	825,055,378	19	1,292,964,174	9	53,328,039	9	527,153,266	9	157,294,983	19	229,596,947	9	967,373,235	47.37%	74.82%	18	1,792,428,613	100	68
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (Laporan)	18	80,000,000	2	2,510,000	18	60,240,160	4	273,170	4	21,394,634	4	16,372,600	6	17,653,672	18	55,694,076	100.00%	92.45%	20	58,204,076	111	73
							1,353,204,334	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										49.71%	75.60%					
								Predikat Kinerja										Sangat Rendah	Tinggi			#DIV/0!	#DIV/0!	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	100	4,500,000	-	-											3,459,730			2	3,459,730	2	77	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu (Laporan)	4	4,500,000	-	-	4	3,494,730	1	298,770	1	540,740	1	1,315,310	1	1,304,910	4	3,459,730	100.00%	99.00%	2	3,459,730	50	77
							3,494,730	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	99.00%					
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasikan kepegawaian perangkat daerah	100	146,000,000	100	2,530,000											72,020,909			-	-			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan (Paket)	31	25,000,000	-	-	22	13,600,000	22	-	-	-	-	13,600,000	-	-	22	13,600,000	100.00%	100.00 %	-	-	-	-
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan (Laporan)	12	31,000,000	-	-	12	34,023,909	3	890,000	3	9,449,422	3	12,153,606	3	11,495,881	12	33,988,909	100.00%	99.90%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang)	18	90,000,000	1	2,530,000	4	34,610,000	-	-	-	-	-	-	4	24,432,000	4	24,432,000	100.00%	70.59%	5	26,962,000	28	30
							82,233,909	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	87.58%				
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Tinggi	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	100	406,000,000	100	245,184,944											331,265,355			100	576,450,299	100	142	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Jenis)	7	5,000,000	7	2,828,800	7	2,489,725	2	-	2	1,184,695	2	681,500	1	622,525	7	2,488,720	100.00%	99.96%	3	2,488,720	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Unit)	-	-	-	-	6	1,290,000	3	-	3	1,290,000	-	-	-	-	6	1,290,000	100.00%	100.00 %	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!

Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (Jenis)	21	6,000,000	1	17,512,500	21	8,150,850	7	-	4	3,492,900	5	2,385,950	5	2,272,000	21	8,150,850	100.00%	100.00%	22	25,663,350	105	428
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Jenis)	3	5,000,000	3	14,479,700	3	23,526,000	3	-	3	5,065,000	3	6,009,900	3	12,451,000	3	23,525,900	100.00%	100.00%	6	38,005,600	200	760
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Eksemplar)	60	9,000,000	60	6,120,000	60	6,120,000	4	410,000	21	2,140,000	13	1,320,000	20	2,040,000	58	5,910,000	96.67%	96.57%	118	12,030,000	197	134
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya (Orang)	220	11,000,000	302	8,262,000	220	9,900,000	17	738,000	7	346,000	65	2,888,000	131	5,928,000	220	9,900,000	100.00%	100.00%	522	18,162,000	237	165
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan (Kali)	437	370,000,000	422	195,981,944	542	294,020,000	74	-	110	95,538,411	128	70,768,100	230	113,693,374	542	279,999,885	100.00%	95.23%	964	475,981,829	221	129
							345,496,575	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										99.94%	95.88%				
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100	129,000,000	100	60,728,000												141,337,700			-	-	-	-
Pengadaan Mabel	Jumlah mabel yang diadakan (Unit)	1	50,000,000	-	-	9	56,800,000	-	-	-	-	-	-	9	55,850,000	9	55,850,000	100.00%	98.33%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin lainnya yang diadakan (Unit)	5	34,000,000	12	60,728,000	9	56,988,700	-	-	-	-	-	-	9	55,938,700	9	55,938,700	100.00%	98.16%	1	55,938,700	20	165
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (Unit)	1	45,000,000	-	-	1	30,400,000	1	-	-	29,549,000	-	-	-	-	1	29,549,000	100.00%	97.20%	1	29,549,000	100	66
							144,188,700	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.02%				

								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100	153,000,000	100	191,259,250										89,338,637			100	280,597,887	100	183		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan (Surat)	350	3,000,000	362	1,440,000	350	1,660,000	50	-	100	850,000	102	-	98	810,000	350	1,660,000	100.00%	100.00%	712	3,100,000	203	103
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan (Rekening)	24	60,000,000	36	27,819,250	24	37,500,000	6	7,557,655	6	7,093,842	6	7,537,668	6	7,289,472	24	29,478,637	100.00%	78.61%	60	57,297,887	250	95
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (Orang)	4	90,000,000	12	162,000,000	4	61,800,000	3	-	3	15,450,000	3	23,750,000	3	19,000,000	3	58,200,000	75.00%	94.17%	15	220,200,000	375	245
							100,960,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										84.70%	49.76%					
								Predikat Kinerja										Tinggi	Sangat Rendah	0	-	-	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara	100	131,000,000	100	26,247,500										42,915,181			100	69,162,681	100	53		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya (Unit)	4	45,000,000	4	16,467,500	4	21,000,000	1	260,000	1	810,000	3	7,236,032	4	12,004,149	4	20,310,181	100.00%	96.72%	8	36,777,681	200	82
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	41	26,000,000	14	9,780,000	36	16,850,000	-	-	9	1,100,000	7	1,370,000	20	13,135,000	36	15,605,000	100.00%	92.61%	50	25,385,000	122	98

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	60,000,000	-	-	1	7,000,000	-	-	1	1,515,000	1	2,245,000	1	3,240,000	1	7,000,000	100.00%	100.00%	1	7,000,000	100	12
							44,850,000	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	0.00%			
								Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Rendah	0	-	-
Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	95	640,667,066	95	15,084,000															95	15,084,000	100	2
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	95	640,667,066	95	15,084,000												98,167,496			95	113,251,496	100	18
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan (Dokumen)	4	640,667,066	1	15,084,000	2	105,416,066	-	710,000	1	6,615,318	-	18,996,000	1	71,846,178	2	98,167,496	100.00%	93.12%	3	113,251,496	75	18
							105,416,066	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											100.00%	93.12%			
								Predikat Kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	-	-

	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	95	415,000,000	95	47,552,000													95	47,552,000	100	11		
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintah serta pemantauan situasi politik	95	415,000,000	95	47,552,000	823,179,949	-							818,448,909			95	866,000,909	100	209			
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM (Orang)	110	250,000,000	25	20,793,000	20	20,021,363	-	-	20	14,935,063	-	-	-	3,470,000	20	18,405,063	100.00%	91.93%	45	39,198,063	41	16

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi (Laporan)	11	85,000,000	1	8,349,000	10	790,949,671	-	-	-	-	10	783,191,756	-	6,953,175	10	790,144,931	100.00%	99.90%	11	798,493,931	100	939
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan Pemantauan Situasi Politik Daerah (Dokumen)	4	80,000,000	4	18,410,000	2	12,208,915	1	-	1	5,134,605	-	-	-	4,764,310	2	9,898,915	100.00%	81.08%	6	28,308,915	150	35
							823,179,949	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	90.97%				
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	-	-	-
Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	95	90,000,000	95	17,077,000															95	17,077,000	100	19
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	110	90,000,000	100	17,077,000		38,791,220	7		47							34,441,615			100	51,518,615	91	57

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Diband Pendaftar Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah SKT yang terbit (Unit)	110	90,000,000	100	17,077,000	100	36,211,220	7	-	47	4,940,105	53	10,791,510	41	18,710,000	100	34,441,615	100.00%	95.11%	200	51,518,615	182	57
							36,211,220	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	95.11%				
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	-	-	-
Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95	250,000,000	95	88,168,400															95	88,168,400	100	35
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama	95	250,000,000	95	88,168,400		214,438,598		17,391,500								211,905,713			95	300,074,113	100	120
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama	4	250,000,000	2	88,168,400	3	214,438,598	1	17,391,500	1	118,855,785	-	20,860,000	1	54,798,428	3	211,905,713	100.00%	98.82%	5	300,074,113	125	120
							214,438,598	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	98.82%				
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	0	-	-	-

	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	95	613,000,000	95	35,069,000														95	35,069,000	100	6	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantauan kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing	95	613,000,000	95	35,069,000										440,078,653			95	475,147,653	100	78		
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah (Dokumen)	4	530,000,000	4	22,385,000	4	415,430,945	1	62,896,236	1	13,130,000	1	88,595,649	1	244,294,060	4	408,915,945	100.00%	98.43%	8	431,300,945	200	81

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama inteljen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing (Dokumen)	4	83,000,000	4	12,684,000	4	35,012,708	1	-	1	6,010,000	1	7,562,708	1	17,590,000	4	31,162,708	100.00%	89.00%	8	43,846,708	200	53
							450,443,653	Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										100.00%	97.70%				
								Predikat Kinerja										Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
			5,777,203,967		1,563,405,472		3,747,538,839	TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM										81,42%	89,34 %				
								PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM										Tinggi	Tinggi				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi terhadap kehidupan politik dan meningkatkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan yang kondusif dalam lingkungan masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yang dipimpin oleh kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berisi tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Analisis kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Luwu Timur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan sasaran target yang ada dalam Renstra Tahun 2021 - 2026. Untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut :

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Renstra 2021 - 2026
Kabupaten Luwu Timur

NO	INDIKATOR 2021	Target Renstra	Indikator 2022-2025	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
		2021		2022	2023	2024	2025	2021	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Persentase Konflik Sosial yang ditangani	96,67	Jumlah Kasus intoleransi antar umat beragama	1	1	1	1	100	1	
2	Persentase ORMAS, LSM OKP dan Parpol yang Aktif	96,32	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	79,18	79,18	80,05	80,05	100	81,00	
3	Nilai SAKIP	72	Nilai SAKIP	67	69	71	72	-	72	

Tabel T-C 31
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
TPB dan SDGs
Kabupaten Luwu Timur

NO	Nomor Indikator TPB/SDGs	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	SATUAN	THN 2016	THN 2017	THN 2018	THN 2019	THN 2020	THN 2021	RUMUS Metadata SDGs/TPB	Keterangan	OPD Pelaksana
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ASPEK PELAYANAN UMUM										
		kesbangpol										
1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	1	2	2	2	0	0	Tidak ada Rumus		KesbangPol
2	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	%	0,1	0,2	0,2	0,2	0	0	$KDK = \frac{JK}{JP} \times 100\%$ Keterangan : KDK : Kematian disebabkan konflik JK : Jumlah korban meninggal disebabkan konflik JP : Jumlah penduduk	JK : Tahun 2016 (1 kasus), Tahun 2017 (2 kasus), Tahun 2018 (2 kasus), Tahun 2019 (2 kasus) dan Tahun 2020 (0 kasus). Dan Jumlah Penduduk (JP) : 100.000 jiwa	KesbangPol

3	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir	%	0	0	0	0	0	0	$P\text{ PKK} = \frac{JP\text{KK}}{JP} \times 100\%$ Keterangan : P PKK : Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir JP KK : Jumlah penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir JP : Jumlah penduduk	JPKK : 6 Kasus, JP : 301,273	KesbangPol
4	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di are tempat tinggalnya	%	0	0	0	0	0	0	$PPMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ Keterangan : PPMA : Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JPMA : Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya JP : Jumlah penduduk	Indikator ke Satpol PP	-

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa :

- Persentase Penanganan konflik sosial

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran dan PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, maka pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 terdapat 3 Program yang mengalami Refocusing pada Indikator ini yakni Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial dimana 1 kegiatan yang mengalami refocussing anggaran yakni Sub kegiatan pelaksanaan koordinasi di bidang ideology akibat adanya pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih mewabah di Kabupaten Luwu Timur sehingga Sub Kegiatan di atas mengalami Refocusing Anggaran, dan anggarannya dialihkan pada anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk percepatan penanganan Covid-19. Hal yang mendasari refocussing kegiatan ini adalah ketiga kegiatan yang mendukung capaian program, pelaksanaannya sangat rentan terhadap penyebaran virus corona disease-19 karena melibatkan atau mengumpulkan banyak orang serta pelaksanaan kegiatan dilakukan diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur. Walaupun sub kegiatan ini mengalami refocussing anggaran namun tidak mempengaruhi capaian program ini, dengan indikator persentase konflik sosial yang ditangani dimana target untuk tahun 2021 sebesar 96,67% dan terealisasi sebesar 100%, hal ini disebabkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, TNI, POLRI dan Masyarakat.

- Persentase Ormas, LSM, OKP dan Parpol yang aktif

Indikator Persentase jumlah Ormas, LSM, OKP dan Parpol yang aktif dimana ada 2 program yang mendukung yakni Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dan Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, target untuk tahun 2021 sebesar 96,32% dan terealisasi sebesar 100%, hal ini disebabkan Ormas (Kelompok Tani/Nelayan dan rumah ibadah), LSM, OKP dan Parpol aktif dalam melengkapi dan melaporkan keberadaannya.

- Nilai SAKIP

Untuk indikator Nilai SAKIP masih 0, karena pemberian nilai pada indikator ini menunggu dilakukannya evaluasi setiap akhir tahun dari Tim Inspektorat Kabupaten.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mewujudkan target kinerja menghadapi beberapa permasalahan antara lain :

1. Kuantitas dan Kualitas SDM Sangat Kurang dan masih perlu ditingkatkan
2. Terbatasnya sarana dan prasarana
3. Adanya Perubahan kelembagaan dari kantor menjadi Badan
4. Adanya pandemi covid-19 yang mewabah di awal tahun 2020 hingga sekarang sehingga mengakibatkan beberapa kegiatan mengalami refocussing.

Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana oprasional yang dimiliki
3. perubahan kelembagaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sudah ditetapkan di akhir Desember tahun 2021.
4. Kurang optimalnya pelaksanaan program / kegiatan karna refocusing anggaran akibat adanya wabah covid-19.

Untuk mengoptimalkan capaian kinerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten luwu timur maka dilakukan beberapa hal :

1. Meningkatkan dan Mengembangkan Kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis
2. Mengajukan permohonan ke BKPSDM untuk meminta penambahan pegawai yang berkompeten
3. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, sambil menunggu penambahan anggaran terkait pengadaan sarana dan prasarana
4. Menjalankan tugas dan fungsi sebagai kelembagaan baru yang baru ditetapkan
5. Memaksimalkan proses pelayanan administrasi perkantoran melalui metode visual

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan ketersediaan sumber anggaran untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Kebutuhan anggaran bersumber dari APBD/DAU Kabupaten Luwu Timur, pada rancangan awal RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, anggaran belanja yang dialokasikan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 4,120,208,839,- Yang terbagi dalam 6 Program, 13 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. Secara rinci analisis kebutuhan anggaran belanja program, kegiatan dan sub kegiatan terhadap rancangan awal RKPD tersaji pada tabel T.C 31 sebagai berikut :

TABEL T-C 31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 2021

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

N O	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Belanja Operasi				3,870,208,839	Belanja Operasi				4,120,208,839	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			100 %	2,581,134,644	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi	100 %	2,560,930,469	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100 %	24,380,675,-	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan dimanfaatkan	100 %	24,380,675,-	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2 Dok	17,493,200	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	2 Dok	17,493,200	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kantor KesbangPol	Jumlah dokumen rka yang disusun tepat waktu	2 Dok	3,443,725	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen rka yang disusun tepat waktu	2 Dok	3,443,725	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	3,443,750	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	10 Dok	3,443,750	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100 %	2,140,215,736	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu & dimanfaatkan	100 %	2,034,107,291	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kantor KesbangPol	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	17 Org	2,081,823,241	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	19 Org	1,975,714,796	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	Dok	58,392,495	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18	Dok	58,392,495	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			100	%	1,804,425	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu & termanfaatkan	100	%	1,804,425	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	Dok	1,804,425	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	4	Dok	1,804,425	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100	%	47,689,208	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasi kepegawaian perangkat daerah	100	%	47,648,378	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12	Dok	31,889,208	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	12	Dok	31,848,378	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kantor KesbangPol	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2	Org	15,800,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	2	Org	15,800,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah			100	%	228,664,600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang tepenuhi	100	%	299,582,700	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kantor KesbangPol	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	jenis	2,194,150	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	jenis	2,194,150	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kantor KesbangPol	Jumlah bahan logistic yang disediakan	21	jenis	3,975,850	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan	21	jenis	3,975,850	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kantor KesbangPol	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Jenis	10.590.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	3	Jenis	10.725.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kantor KesbangPol	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Exp	6,120,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60	Exp	6,120,000	

			yang disediakan					yang disediakan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kantor KesbangPol	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	150 org	6,750,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah tamu yang di fasilitasi kunjungannya	150 org	6,750,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor KesbangPol	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	266 kali	199,034,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	266 kali	269,818,200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			0 %	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan	100 %	15,000,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor KesbangPol	Jumlah Peralatan / Mesin Lainnya yang diadakan	0 Unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan / Mesin Lainnya yang diadakan	1 Unit	15,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	96,900,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	100 %	96,900,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kantor KesbangPol	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	350 Surat	2.400.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	350 Surat	2.400.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor KesbangPol	Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan	24 Rek	37.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan	24 Rek	37.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kantor KesbangPol	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Org	57,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	3 Org	57,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100 %	41,480,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 %	41,480,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kantor KesbangPol	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	21.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	21.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor KesbangPol	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	29 Unit	13,480,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	29 Unit	13,480,000	

	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kantor KesbangPol	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	7,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi i sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	1 Unit	7,000,000	
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			95 %	89,115,655	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	95 %	84,835,590	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			95 %	89,115,655	Perumus Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan an Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	95 %	84,835,590	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan yang disusun	2 Laporan	89,115,655	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan yang disusun	2 Laporan	84,835,590	
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik			95 %	724,517,315	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta buaya politik	95 %	724,517,315	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			95	%	724,517,315	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan		Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik	95	%	724,517,315	
Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	20	Org	30,966,350	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	20	Org	30,966,350	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	10	Lap	684,198,925	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	10	Lap	684,198,925	

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	4	Dok	9,352,040	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Parpol, Pemilihan Umum/PILKADA Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	4	Dok	9,352,040
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			95	%	24,351,370	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	95	%	24,351,370
Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			102	Unit	24,351,370	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	102	Unit	24,351,370
Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah SKT yang terbit	102	Unit	24,351,370	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah SKT yang terbit	102	Unit	24,351,370
PROGRAM PEMBINAAN & PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		95	95	%	114,975,625	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	95	%	360,501,865
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi,		95	95	%	114,975,625	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama	95	%	360,501,865

Sosial dan Budaya						Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya					
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama & Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama	2	Lap	114,975,625	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama	2	Lap	360,501,865
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			95	%	336,114,230	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	95	%	365,099,230
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			95	%	336,114,230	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing	95	%	365,099,230
Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	4	Dok	322,217,925	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	4	Dok	351,202,925

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kantor KesbangPol	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4	Dok	13,896,305	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	4	Dok	13,896,305	
TOTAL					3,870,208,839						4,120,208,839	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 mengakomodir program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, Ormas, LSM, OKP maupun dari hasil pengumpulan informasi perangkat daerah dari pemantauan lapangan pada pelaksanaan musrembang kecamatan. Secara umum tidak ada usulan program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat pada kegiatan musrembang dan forum organisasi perangkat daerah untuk tahun 2022 yang berhubungan langsung dengan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat, Pembangunan nasional yang ditetapkan untuk tahun 2022 tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 dengan tema "Peningkatan daya saing daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas".

Dalam Rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) 2021, ditetapkan prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi berbasis pertanian, ekonomi kerakyatan dan pariwisata.
2. Peningkatan kualitas SDM.
3. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan pengembangan wilayah.
4. Pengembangan SDA dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 dan isu strategis Tahun 2022.

Untuk mewujudkan daerah Kabupaten Luwu Timur yang berdaya saing daerah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimasa sekarang dan yang akan datang membutuhkan perencanaan kebijakan yang lebih akurat dan akuntabel. Sehubungan dengan hal tersebut maka disusun Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa & Politik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

a. Tujuan

Dalam rangka Mewujudkan target pembangunan daerah maka tujuan yang ingin dicapai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran FKUB dalam membangun kerukunan agama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Sasaran

Dalam upaya menuju tercapainya tujuan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur, maka sasaran Kantor Kesatuan Bangsa & Politik adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD

Tujuan dan sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel TC-32

TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Persentase peningkatan Peran FKUB dalam membangun Kerukunan beragama serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya	Terciptanya kerukunan umat beragama yang harmonis	Persentase konflik keagamaan yang terdata dan terfasilitasi	80,50
			Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam Pemilihan umum	Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu nasional dan lokal	79,18
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD	Nilai SAKIP	67

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan target sasaran renja Badan kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 melaksanakan program, kegiatan dan Sub Kegiatan antara lain :

I. Sasaran : Terciptanya Kerukunan Umat Beragama yang Harmonis**1. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA & KARAKTER KEBANGSAAN****a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan.

3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

4. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

II. Sasaran : Meningkatnya partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum

1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

- **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik**
 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Parpol, Pemilihan Umum/PILKADA, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.
 - Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/PILKADA, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah.

2. PROGRAM PEMBERDAYAAN & PENGAWASAN ORMAS

- **Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**
 - Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

III. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi & Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Merencanakan melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 29 Sub Kegiatan. dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,120,208,839,-. Alokasi Program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta indikasi pendanaan Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL TC-33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KESBANGPOL TAHUN 2022
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Form 2

NO	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/ Program Kegiatan	Rencana Tahun 2022			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	8	9	10
	Belanja Operasi				4,120,208,839			4,781,733,733
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata kinerja pelayanan administrasi perkantoran terpenuhi		100 %	2,560,903,469			3,562,688,822
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kantor KesbangPol	100 %	24,380,675			30,500,000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	Kantor KesbangPol	2 Dok	17,493,200			18,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rka yang disusun tepat waktu	Kantor KesbangPol	2 Dok	3,443,725			4,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen dpa yang disusun tepat waktu	Kantor KesbangPol	0 0	0			4,000,000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kantor KesbangPol	10 Dok	3,443,750			4,500,000

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu dan termanfaatkan	Kantor KesbangPol	100	%	2,034,107,291		2,193,868,822
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan	Kantor KesbangPol	19	Org	1,975,714,796		2,133,868,822
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Kantor KesbangPol	18	Dok	58,392,495		60,000,000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase laporan BMD pada perangkat daerah yang disusun tepat waktu & termanfaatkan	Kantor KesbangPol	100	%	1,804,425		2,000,000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun tepat waktu	Kantor KesbangPol	4	Dok	1,804,425		2,000,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase data dan informasi pegawai perangkat daerah yang diadministrasi kepegawaian perangkat daerah	Kantor KesbangPol	100	%	47,648,378		115,200,000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kantor KesbangPol	0	0	0		21,200,000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	Kantor KesbangPol	12	Dok	31,848,378		34,000,000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kantor KesbangPol	2	Org	15,800,000		60,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kebutuhan umum perangkat daerah yang terpenuhi	Kantor KesbangPol	100	%	299,582,700		266,820,000

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kantor KesbangPol	7 jenis	2,194,150			2,700,000
Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya/Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor KesbangPol	0 0	0			1,600,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistic yang disediakan	Kantor KesbangPol	21 jenis	3,975,850			6,000,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kantor KesbangPol	3 Jenis	10.725.000			12,000,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Kantor KesbangPol	60 Exp	6,120,000			7,320,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	Kantor KesbangPol	150 org	6,750,000			7,200,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Kantor KesbangPol	266 kali	269,818,200			230,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	Kantor KesbangPol	100 %	15,000,000			770,800,000
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kantor KesbangPol	0 Unit	0			70,000,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan / Mesin Lainnya yang diadakan	Kantor KesbangPol	1 Unit	15,000,000			50,800,000
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kantor KesbangPol	0 Unit	0			150,000,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Kantor KesbangPol	0 Unit	0			500,000,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	Kantor KesbangPol	100 %	96,900,000			102,500,000

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang diadministrasikan	Kantor KesbangPol	350	Surat	2.400.000			2,700,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening, telepon, listrik dan air yang terbayarkan	Kantor KesbangPol	24	Rek	37.500.000			38,000,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan	Kantor KesbangPol	3	Org	57,000,000			61,800,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Kantor KesbangPol	100	%	41,480,000			67,850,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kantor KesbangPol	4	Unit	21.000.000			21,000,000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	Kantor KesbangPol	29	Unit	13,480,000			15,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor & bangunan lainnya yg dipelihara/direhabilitasi	Kantor KesbangPol	0	Unit	0			15,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kantor KesbangPol	1	Unit	7,000,000			16,850,000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan	Kantor KesbangPol	95	%	84,835,590			239,573,635
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa dan pembauran kebangsaan yang disusun	Kantor KesbangPol	95	%	84,835,590			239,573,635

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi di bidang ideology wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan	Kantor KesbangPol	2	Laporan	84,835,590		239,573,635
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Kantor KesbangPol	95	%	724,517,315		1,075,000,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik	Kantor KesbangPol	95	%	724,517,315		1,075,000,000
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah pengurus parpol dan masyarakat yang mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Kantor KesbangPol	20	Org	30,966,350		140,000,000
	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah laporan partai politik yang diverifikasi	Kantor KesbangPol	10	Lap	684,198,925		700,000,000
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan	Persentase partisipasi pemilih (%)	Kantor Kesbangpol	0	0	0		200,000,000

	Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah							
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan situasi politik daerah	Kantor KesbangPol	4	Dok	9,352,040		35,000,000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	Kantor KesbangPol	95	%	24,351,370		60,000,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi	Kantor KesbangPol	102	Unit	24,351,370		60,000,000
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah SKT yang terbit	Kantor KesbangPol	102	Unit	24,351,370		60,000,000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Kantor KesbangPol	95	%	360,501,865		160,000,000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama	Kantor KesbangPol	95	%	360,501,865		160,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Persentase capaian pelaksanaan koordinasi kerukunan umat beragama	Kantor KesbangPol	2	Lap	360,501,865		160,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi	Kantor KesbangPol	95	%	365,099,230		465,000,000

		penanganan konflik sosial						
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase capaian pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional, penanganan konflik sosial dan pemantauan orang asing	Kantor KesbangPol	95 %	365,099,230			465,000,000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan konflik sosial dan kewaspadaan dini di daerah	Kantor KesbangPol	4 Dok	351,202,925			430,000,000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan pengawasan dan pemantauan orang asing	Kantor KesbangPol	4 Dok	13,896,305			35,000,000
	Total				4,120,208,839			5,549,112,457

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 Kabupaten Luwu Timur di maksudkan dengan harapan semoga pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan baik perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal sehingga hasil dan dampak interfensi program, kegiatan dan Sub Kegiatan bisa terwujud demi terciptanya optimalisasi pembangunan di bidang Politik dan Peningkatan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja Tahunan yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dari berbagai pihak untuk penyempurnaan perencanaan di masa – masa yang akan datang.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2022 Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur ini dapat menjadi dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat demi Mewujudkan Harmonisasi Kehidupan Umat Beragama dan Stabilitas Politik di Masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Malili, Januari 2022

Kepala Kantor,



Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19710502 199208 1 001

